

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini “ USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-FALAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA DI CEPER KAB. KLATEN. “ Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan sebagai berikut :

#### 1. Usaha

Menurut istilah usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, untuk suatu maksud, pekerjaan ( perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya, upaya ) untuk mencapai sesuatu.<sup>1</sup>

Yang penulis maksudkan dengan usaha BMT Al-falah dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

#### 2. Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Al-falah

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan paduan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

- a. Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.997

- b. Baitul Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.<sup>2</sup>

Jadi Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan Islam yang melandaskan kegiatannya pada prinsip Syari'ah.

Sedangkan yang dimaksud BMT Al-falah dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan Islam berdasarkan pada prinsip Syari'ah dengan nama Al-falah yang berada di Ceper Kabupaten Klaten.

### 3. Meningkatkan Kesejahteraan

Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya), mempertinggi, memperhebat.<sup>3</sup>

Kesejahteraan adalah kepentingan yang tertuju pada pencapaian kehidupan sejahtera bagi pribadi dan kelompok.<sup>4</sup>

Yang penulis maksud dalam meningkatkan kesejahteraan di sini adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya melalui baitul maal dan baitul tamwil. Dalam penelitian ini yang mendominasi adalah baitul tamwilnya.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Islam Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII press, 2000), hal.114

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.114

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.543

#### 4. Anggota

Anggota, menurut bahasa berarti bagian, sedangkan menurut istilah anggota adalah sesuatu sebagai bagian dari kesatuan atau dengan pengertian lain anggota berarti orang yang turut dalam perkumpulan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud anggota adalah yang menjadi nasabah BMT Al-falah dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian maka maksud judul dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap lembaga BMT Al-falah di Ceper Kabupaten Klaten yang berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya dibidang ekonomi dan sosial untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya.

#### B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur yang demikian penting.<sup>6</sup>

Usaha meningkatkan ekonomi rakyat diarahkan untuk mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses

---

<sup>5</sup> Yulius, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: PT.Usaha Mulia, 1984), hal.15

<sup>6</sup> Hertanto Widodo,Ak, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Jakarta: Mizan, 1999), hal. 43

perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan penguasaan teknologi.

Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. Diantara aset produksi yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

Modal usaha yang diperlukan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produksi harus berasal dari kemampuan sendiri. Tabungan yang dikumpulkan kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan digunakan sebagai pembentukan modal. Dengan modal inilah produksi (kegiatan ekonomi) akan semakin meningkat.<sup>7</sup>

Sebagai produsen, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Mereka adalah *price taker*, karena jumlahnya yang banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang kecil. Lebih jauh lagi, dalam transaksinya mereka biasanya menghadapi kekuatan besar. Dengan persaingan yang tidak seimbang ini, keuntungan yang lebih besar jatuh pada pengusaha besar. Keadaan ini harus diperbaiki. Untuk itu, pertama-tama rakyat harus

---

<sup>7</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.7

dibantu dengan prasarana dan sarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya.

Mereka yang bersumber daya keuangan lemah terpaksa berusaha dengan kemampuan sendiri. Padahal sektor keuangan bagi sebuah usaha sangatlah dominan. Sedangkan sistem permodalan modern relatif tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bank dan lembaga keuangan lainnya hanya terdapat di kota-kota besar, walaupun ada di kota-kota kecil, jangkauan belum maksimal sehingga belum terasa pengaruhnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % s/d 90 %. Kekosongan ini diisi oleh lembaga non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para renternir dengan suku bunga yang sangat tinggi.<sup>8</sup>

Kokohnya perekonomian kerakyatan di Indonesia akan merupakan dasar tumbuhnya perekonomian umat yang mencakup jumlah pelaku ekonomi yang besar, beragam dan tersebar meluas. Sehingga adanya kendala pendanaan di tingkat produsen dapat diupayakan dibantu oleh lembaga keuangan yang mapan dan terpercaya serta dimiliki oleh dan dari umat atau masyarakat sekitarnya. Bentuk institusi yang dimasyarakatkan tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.5

Potensi-potensi umat yang sekarang ada dan bersifat tradisional perlu diatur tata niaganya secara Islami dengan menggunakan instrumen-instrumen ekonomi Islam yang salah satunya adalah BMT . Tumbuhnya potensi perekonomian umat menjadi kekuatan mandiri akan memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan umat.<sup>9</sup>

Akibat adanya pelemahan dalam masyarakat kecil bawah disektor pengetahuan, maka terjadi kesenjangan yang sangat merata serta dapat diukur dalam bidang ekonomi. Walaupun pembangunan terus dilakukan namun tetap saja ditemukan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Sebagian besar pengusaha kecil di wilayah Ceper masih berada pada sektor yang secara ekonomi kurang menguntungkan, yaitu sektor pertanian. Akibat pertambahan penduduk dan keterbatasan lahan maka sektor pertanian menjadi menyempit. Kesempatan bekerja di sektor ini semakin langka. Petani pemilik lahan maupun petani tanpa lahan semakin banyak jumlahnya. Sehingga yang terjadi di pedesaan adalah terjadi polarisasi. Dimana pemilik tanah semakin berkurang dan jumlah petani semakin meningkat.

Mereka mencoba mengatasi ini dengan masuk ke sektor lain yang kebanyakan mereka skeptis untuk melanjutkan usahanya. Mereka masuk ke dunia perdagangan, industri rumah tangga dan jasa sektor jasa. Karena mereka masuk ke dunia yang sangat baru bagi mereka, akhirnya mereka menjadi kaum yang ada di kulit paling bawah. Sehingga muncul istilah bagi mereka adalah masyarakat akar rumput (*grass root*).

---

<sup>9</sup> Baihaqi Abd. Madjid dan Syaifuddin A. Rasyid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah* (Jakarta: PINBUK, 2000), hal.164

Gambaran tersebut bisa kita sinkronkan secara global dengan data statistik penduduk di Indonesia, bahwa usaha kecil di Indonesia berjumlah 33,4 juta yang tersebar diberbagai sektor. Jumlah yang terbanyak adalah sektor pertanian (63,8 %), perdagangan (17,4 %), industri pengolahan (7,5 %), jasa (4,8 %), angkutan (3,6 %).

Rata-rata usaha kecil yang tersebar di wilayah Ceper memiliki omzet di bawah 5 juta ke bawah. Padahal standar ukuran usaha kecil adalah mereka memiliki omzet paling tidak 50 juta. Secara nyata dapat kita lihat betapa masih tertinggalnya mereka jika dihubungkan dengan jaman market ekonomi saat ini sebagai tuntutan dunia. Bahkan sebagian usaha kecil dan masyarakat wilayah Ceper memiliki omzet di bawah 1 juta, dan lebih banyak lagi yang dibawah 100 ribu rupiah. Mereka ini memang sudah berada di garis kemiskinan. Mereka memang tidak lagi kelaparan, namun tidak bisa dikatakan hidup layak. Mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang pantas, membeli makanan yang cukup bergizi, memenuhi kebutuhan pendidikan, pakaian, dan perumahan. Berangkat dari hal diatas, maka atas prakarsa Pemuda Muhammadiyah Cabang Ceper, Klaten berkumpul beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan masyarakat kecil, khususnya umat Islam untuk membentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan nama BMT Al-falah.

BMT Al-falah merupakan lembaga keuangan Islam yang melandaskan prinsip-prinsip operasionalnya berdasarkan Syari'ah dengan tujuan membantu meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil yaitu dengan

mendorong kegiatan simpanan dan memberikan pembiayaan untuk kesejahteraan anggotanya. Wujud dari kesejahteraan itu adalah dengan memberikan kemudahan dalam peminjaman modal dengan sistem bagi hasil yang tidak terlalu memberatkan pengusaha kecil dan sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Dalam usaha pencapaian tujuan tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun faktor penghambatnya.

Kehadiran BMT Al-falah tersebut ternyata mendapat sambutan yang baik dari umat Islam di Ceper Kab. Klaten karena sangat membantu dalam upaya peningkatan perekonomian kesejahteraan umat Islam. Dengan adanya aktivitas dari BMT Al-falah maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana pelaksanaan usaha BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten ?

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan usaha BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten ?



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan usaha BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi BMT Al-falah agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru terhadap masyarakat Islam untuk lebih mengenal tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga sebagai bahan pemikiran terhadap pengembangan lembaga-lembaga keuangan Islam.

#### **F. Landasan Teori**

1. Tinjauan Tentang Kesejahteraan

Ekonomi Islam yang dimaksud adalah madzab ekonomi yang di dalamnya terjelma bagaimana Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai dan moral Islam dan nilai-nilai ilmu

ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada kaitannya dengan siasat perekonomian.

Dalam bahasa yang lebih singkat, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. Secara sekilas, ciri-ciri dari ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam
- b. Kegiatan ekonomi Islam bersifat pengabdian
- c. Kegiatan ekonomi Islam bercita-cita luhur
- d. Pengawasan atas pelaksana kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapatkan kedudukan utama
- e. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Berkenaan dengan hal ini, Waqar Ahmad Husein memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai ekonomi kesejahteraan. Sebagai bagian dari fungsi kesejahteraan sosial Islam, fungsi kesejahteraan ekonomi Islam merumuskan tujuan-tujuan dan obyek-obyek ekonomi, prinsip-prinsip dan kriteria bagi kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat.

Sebuah konsep penting mengenai mentalitas kultural Islam yang integral, sebagaimana dikutip oleh Waqar Ahmad Husein menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi manusia bukan merupakan ukuran, tetapi merupakan alat penting agar ia dapat mencapai kesejahteraannya yang total.

Garis besar dari fungsi kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dasar ekonomi, serta berbagai kriteria dari pengeluaran sosial. Prinsip-prinsip mengenai fungsi kesejahteraan ekonomi Islam tadi, secara singkat dapat dikemukakan seperti dibawah ini:

- a. Pemilikan Allah terhadap alam semesta
- b. Aktivitas ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip persaudaraan, persamaan, dan perwalian ekonomi yang universal.
- c. Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran, saling membantu. Allah SWT telah menciptakan perbedaan dalam tujuan, keberanian, perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi, sehingga seorang manusia bergantung pada lainnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonominya.<sup>10</sup>

Kemandirian ekonomi bagi masyarakat merupakan kaidah penting dalam ekonomi Islam. Artinya masyarakat Islam harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, sarana dan peralatan yang menjadikan ia mampu untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhannya. Baik secara materi maupun non materi. Tanpa kemandirian maka umat tidak memiliki *'izzah* (harga diri). Dan tanpa mencukupi diri mereka, maka tidak akan pernah terwujud kemandirian dan kemimpinan yang hakiki.

Adapun untuk menuju kepada kemandirian ekonomi masyarakat dan menuju swasembada perlu dilakukan cara-cara yaitu :

---

<sup>10</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), hal.19

a. Membuat *Planning* (perencanaan)

Kita harus membuat perencanaan berdasarkan data statistik yang dirinci dan angka yang sebenarnya (konkrit), pengertian yang sempurna terhadap realitas lapangan, memahami prioritas setiap program serta sejauhmana kepentingannya mengenal kemampuan diri dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan, juga menyiapkan sarana-sarana untuk memenuhi semua hidupnya.

b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya dengan tepat.

Merupakan kewajiban bagi umat untuk meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di segala bidang kehidupan. Selain itu perlu adanya penempatan personel pada *job training* tepat sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan membagi potensi yang ada itu dalam berbagai spesialisasi dengan seimbang. Selain itu umat diharapkan bisa memenuhi sisi-sisi yang sering dilupakan dengan mengadakan terobosan-terobosan baru dan evaluasi secara berkala. Hendaknya meletakkan pada posisi sesuai dengan keahliannya dan berupaya menghindari dari sesuatu kepada yang bukan ahlinya.

c. Memfungsikan aset yang ada dengan sebaik-baiknya.

Mempergunakan dan memfungsikan aset ekonomi serta kekayaan materi dengan baik itu bisa dilakukan dengan tidak

membiarkan sesuatu tanpa guna dan tetap memeliharanya dengan baik. Karena itu merupakan amanah yang harus dijaga dan nikmat yang wajib disyukuri dengan mempergunakannya secara tepat dan maksimal.

d. Kondisi antar sektor-sektor produksi

Yang terpenting disini agar masyarakat bisa mencukupi kebutuhan mereka secara mandiri. Hendaknya umat menyempurnakan koordinasi dan konsolidasi antar berbagai bidang produksi yang beraneka ragam, sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak baik jika perhatian itu ditujukan pada masalah pertanian saja, dasar yang sama masalah industri diabaikan atau sebaliknya.

e. Mengembangkan kekayaan finansial

Diantara kewajiban umat Islam adalah mengeluarkan harta yang ditangannya untuk diputar dan diinvestasikan. Karena uang dan harta itu bukan untuk ditahan dan ditimbun.<sup>11</sup>

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Indonesia bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus dan terus ditingkatkan kualitas kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya.

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Penerjemah :Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal.208

Sejalan dengan pandangan kemanusiaan dalam hakekat pembangunan harus makin mewujudkan keadilan dan pemerataan. Agar mencapai sasarannya, maka pembangunan nasional yang bertumpu pada peran serta masyarakat diselenggarakan secara merata disemua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air.<sup>12</sup>

Keadaan hidup yang sejahtera adalah dambaan bagi setiap manusia berbagai cara dan upaya telah ditempuh, serta berbagai program dan kegiatan telah dicanangkan untuk meraihnya. Mulai dari perbincangan dalam forum keluarga atau kecil sampai dalam perbincangan dalam skala besar, tidak lain dari tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan yang dicita-citakan.

Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.<sup>13</sup>

Di sisi lain, pengertian kesejahteraan sosial dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, "Tentang Ketentuan-Ketentuan

---

<sup>12</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 233

<sup>13</sup> T.Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: PT. Hanindita:1984), hal.31

Pokok Kesejahteraan Sosial “ Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”<sup>14</sup>

Dari berbagai batasan dan perumusan kesejahteraan sosial di atas, jelaslah bahwa kesejahteraan bukanlah merupakan anugerah yang turun dari langit, melainkan hasil jerih payah serta perjuangan yang gigih.

Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut, seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim , dalam upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi :

a. Modal

Merupakan faktor produksi yang sangat essensial bagi fakir miskin dalam proses meningkatkan mutu kehidupannya, oleh karena itulah zakat harus dimanfaatkan dan dikelola sebagai modal yang masuk dalam proses produksi tersebut.

b. Keterampilan

Merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan

---

<sup>14</sup> Ibid., hal. 33

pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.

c. Teknologi

Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam memproduksi.

d. Lahan usaha

Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka sesuai dengan fungsinya, zakat dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak fakir miskin dalam mengelola lahan mereka.

e. Manajemen

Dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah maka faktor manajemen sangat diperlukan, dapat dibayangkan jika dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, faktor manajemen ini tidak diperhatikan maka akan sulit diharapkan program yang dijelaskan akan berjalan optimal.<sup>15</sup>

Di dalam masyarakat yang lebih majemuk dimana masalah sosial makin beragam coraknya dan memerlukan cara penanggulangan yang lebih efisien serta tepat guna maka dirasa penting melembagakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Untuk ini diperlukan kriteria-kriteria tertentu.

Wilensky dan Lebeaus mengemukakan lima kriteria-kriteria untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat disebut sebagai usaha kesejah-

---

<sup>15</sup> Usman Yatim dan Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT.Bina Rena Pariwara, 1992), hal. 243



teraan sosial yaitu :

a. *Formal Organization*

Usaha-usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu organisasi yang formal. Pemberian bantuan dan amal perorangan, walaupun mereka mengadakan usaha kesejahteraan. Namun demikian tidak terorganisasi secara formal. Juga pelayanan-pelayanan dan bantuan dalam hubungan saling tolong menolong seperti keluarga, sahabat-sahabat, tetangga dan semacamnya tidak termasuk dalam pengertian struktur kesejahteraan sosial.

b. *Social Sponsorship dan Accountability*

Usaha kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh masyarakat atas dukungan masyarakat. Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial harus pula dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika penggerakan sumber-sumber daya untuk mencapai kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh keluarga maupun ekonomi pasar, beberapa jenis organisasi yang ketiga harus tersedia dan hal ini merupakan suatu usaha masyarakat secara keseluruhan yang diwakili oleh pemerintah atau masyarakat kecil yang beroperasi melalui badan-badan sosial swasta.

c. *Absence of Profit Motive as Dominant Program Purpose*

Tidak ada motif mencari keuntungan sebagai tujuan yang menonjol dalam sesuatu program. Pelayanan-pelayanan dan produksi jasa dari ekonomi pasar ataupun melalui jalan pembelian oleh perorangan

dengan pengeralahan uang yang bersifat persaingan dalam segi ekonomi bukan merupakan usaha kesejahteraan sosial. Demikian pula segala usaha yang menekankan keuntungan dan pembayaran yang tinggi untuk jasa pelayanan.

d. *Functional Generalization : An Integrative View of Human Needs*

Melalui fungsi yang bersifat umum yaitu ada kebulatan pandangan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang memerlukan bantuan dan perlu dipenuhi. Bertitik tolak dari sudut struktur kesejahteraan sosial sebagai suatu keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menggambarkan fungsi umum sebagaimana mestinya, jikalau pelayanan-pelayanan kesejahteraan bukan hanya diselenggarakan untuk mengisi kekurangan-kekurangan, atau karena lembaga-lembaga lain seperti lembaga mendidik, keluarga, pendidikan, industri tidak dapat memenuhi kebutuhan.

e. *Direct Concern with Consumption Needs*

Secara langsung berhubungan dengan konsumsi kebutuhan-kebutuhan manusia.

Sehubungan dengan kriteria-kriteria tersebut dapatlah dikatakan bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai komponen seperti program-program pelayanan-pelayanan, peraturan atau perundang-undangan, tanggung jawab masyarakat dan para petugas pelaksana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> T. Sumarnonugroho, op.Cit., hal. 45

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- b. Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan
- c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam kesejahteraan sosial diperlukan suatu standar, yaitu norma atau ukuran yang dapat dipakai sebagai pedoman dan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai organisasi formal yang menjalankan tugasnya secara profesional perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang merupakan isi standar sebagai berikut :

- a. Tempat, gedung dan peralatan serta fasilitas-fasilitas lain yang memadai
- b. Tenaga administratif yang cakap dan tersedianya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelayanan kepada klien
- c. Program kegiatan yang jelas baik yang menyangkut jangka panjang maupun jangka pendek

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 51

- d. Tata laksana kesejahteraan sosial yang teratur dan tertib (mencakup adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi, anggaran belanja, statistik serta laporan kegiatan).<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

### a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil yang dapat disingkat menjadi BMT merupakan sebuah lembaga keuangan Islam yang berlandaskan sistem Syari'ah dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil. BMT terdiri dari dua fungsi yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

Baitul maal adalah suatu institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersil. Sumber dana baitul maal berasal dari zakat, infaq, shadaqah, sumbangan dan lain-lain. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq) yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil (8 asnaf).

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah :

- 1) Visi dan misi sosial
- 2) Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq)

---

<sup>18</sup> Ibid., hal.57

- 3) Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya

Dalam baitul maalnya tidak boleh mengambil keuntungan dari usaha yang dijalankan.

- 4) Pembiayaan operasi diambil dari 12,5 % dari total zakat yang diterima.<sup>19</sup>

Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga tersendiri pada masa Umar bin Khatab atas usulan seorang faqih yaitu Walid bin Hasyim. Pada waktu itu Baitul Maal merambah banyak urusan yaitu mulai dari penarikan zakat, pajak pembangunan jalan, menggaji tentara dan pejabat serta membangun sarana-sarana sosial.

Sejak masa dinasti Abbasiyah dan Ummayah, Baitul Maal telah menjadi institusi yang vital bagi negara. Baitul Maal dan Baitul Tamwil melakukan peranan sebagai Bank Islam Yang di Indonesia saat ini dimanifestasikan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah.

Baitul Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan atau tabungan, deposito, saham dan lain-lain, alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayan dan investasi.

Ciri-ciri operasional Baitul Tamwil :

---

<sup>19</sup> PINBUK, *Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil*, hal. 4

- 1) Visi dan misi ekonomi
- 2) Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam
- 3) Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam)
- 4) Pembiayaan operasi berasal dari aset sendiri atau dari keuntungan
- 5) Merupakan wajib zakat.<sup>20</sup>

Secara struktural, dalam skala yang lebih luas telah berdiri BMI dengan prinsip-prinsip operasionalnya yang sama dengan BMT. Bank Syari'ah dalam operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Yang melatarbelakangi berdirinya BPR Syari'ah adalah karena BPR Syari'ah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan moneter dan perbankan secara umum, secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga, yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Kaitannya BMT dengan BPR Syari'ah adalah sama-sama lembaga keuangan Islam yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Yang membedakan diantara keduanya ( BMT dan Bank Syari'ah ) adalah BMT merupakan sebuah lembaga keuangan non bank dan BPR Syari'ah sendiri mempunyai hak hidup dalam sistem perbankan Nasional.

---

<sup>20</sup> PINBUK, *Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil*, hal. 4-5

Berdirinya BMT yang merupakan lembaga keuangan Islam dengan sistem bagi hasil atau bukan dengan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, adalah semacam bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Di dalam tata cara itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembayaran perdagangan.

Walaupun kedua konsep di atas yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil memiliki definisi yang berbeda, namun dalam operasinya tidak harus merupakan badan terpisah, satu sama lain saling mendukung dan berhubungan, misalnya sebagai keuntungan Baitul Tamwil baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan kelebihan dana di Baitul Maal disimpan di Baitul Tamwil. Hal ini jelas akan memperbesar aset di Baitul Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.

Menurut “Buku Pedoman Cara Pembentukan BMT” yang disusun oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang dimaksud BMT adalah Balai Usaha Terpadu yang isinya berintikan konsep Baitul Maal Wat Tamwil. Kegiatan BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua* (Jakarta : Teraju, 2003), hal. 238

Adapun tujuan BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya para pengusaha kecil
- 2) Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana
- 3) Membebaskan umat, pedagang, pengusaha kecil dari cengkeraman bunga dan renternir
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan
- 5) Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank atau lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga
- 6) Dan tujuan lainnya yang mengarah kepada perbaikan ekonomi umat Islam.<sup>22</sup>

Visi BMT adalah semakin meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT yang memakmurkan kehidupan anggotanya pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan serta makmur-maju berkeadilan Syari'at dan ridha Allah SWT.

---

<sup>22</sup> PINBUK, op.Cit., hal. 5-6



Adapun fungsi BMT adalah :

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Agar BMT tersebut berjalan sesuai dengan Syari'ah sesuai dengan visi dan misi BMT, maka seluruh kegiatan BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yakni :

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah ke dalam kehidupan nyata
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia
- 3) Koperasi
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme

- 7) Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas (berkelanjutan tanpa henti), dan tanpa pernah putus asa.<sup>23</sup>

Berdirinya BMT dalam rangka implementasi dari doktrin ekonomi Islam yang mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akherat. Oleh karena itu setiap pelaksanaan BMT harus menghindari praktek-praktek yang menyimpang dari Syari'ah seperti :

- 1) Menjauhkan diri dari unsur riba : menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian sistem prosentasi terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang / simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu yang dapat dilihat dalam surat Ali Imron : 130<sup>24</sup>

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة صلى وا تقوا  
 الله لعلكم تفلحون (ال عمران: ١٣٠)

Artinya : "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan." (Q.S Ali Imron: 130)<sup>25</sup>

- 2) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan : setiap transaksi kelembagaan Syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, op.Cit., hal. 238-239

<sup>24</sup> Muhammad, op.Cit., hal. 111

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 97

perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang / jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang / jasa, dapat dihindari penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>26</sup>

b. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat kedua fungsi tersebut adalah :

- Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
- Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan BMT adalah akad wadi'ah dan mudharabah :

---

<sup>26</sup> Muhammad, op.Cit., hal. 111

- a) Simpanan Wadi'ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahan / transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi BMT. Simpanan berakad wadi'ah ada dua :
- Wadi'ah Amanah
  - Wadi'ah Yadhamanah
- b) Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti :
- Simpanan Idul Fitri
  - Simpanan Idul Qurban
  - Simpanan Haji
  - Simpanan Pendidikan
  - Simpanan Kesehatan

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

## 2) Produk Penyaluran Dana BMT

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dana atau meningkatkan dana atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada akad, yaitu :

- Akad syirkah
- Akad jual beli

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota, diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah :

- a) Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk investasi dan atau pemberian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang telah disepakati.
- b) Pembiayaan Murabahah (MBA) pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- c) Pembiayaan mudharabah (MDA) pembiayaan dengan akad Syirkah. Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana

tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

- d) Pembiayaan Musyarakah (MSA) pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- e) Pembiayaan Qordhul Hasan. Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang dianggap terbesar dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usaha bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban usahanya.<sup>27</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari BMT sendiri tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Yang dimaksud faktor pendukung adalah faktor yang dapat mendukung kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang menjadi faktor pendukung adalah:

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 118-120

1. Melakukan silaturahmi dengan para ulama<sup>28</sup>

Dengan melakukan silaturahmi secara rutin kepada para ulama dan menjelaskan kepadanya perihal program BMT. Serta memohon petunjuk yang baik bagaimana seharusnya program ini dijalankan langkah demikian diharapkan dapat mengetuk hati para ulama untuk berkenan membantu BMT dalam mengarahkan umatnya menuju pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum Syari'ah serta penunaianya secara terorganisir melalui lembaga tersebut agar lebih berguna bagi pembangunan.

2. Sosialisasi BMT kepada masyarakat<sup>29</sup>

Melakukan sosialisasi BMT di tengah masyarakat dengan melakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan tingkat pengetahuan masyarakat.

3. Hubungan antara pemodal dan pengusaha yang saling asah, asih, asuh.<sup>30</sup>

Sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka hubungan antara BMT sebagai pemodal dan pengusaha kecil tidaklah hanya sebatas sebagai hubungan antara bankir dan nasabah. Di mana bankir tidak mencampuri urusan usaha nasabah. Petugas BMT

---

<sup>28</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal. 73

<sup>29</sup> Ibid., hal. 78

<sup>30</sup> Baihaqi Abd. Madjid dan Syaifuddin A. Rasyid, op. Cit., hal. 227



tidak hanya memberikan pembiayaan kemudian datang menagih angsuran. BMT harus bertanggung jawab agar usaha yang dijalankan bisa untung, paling kurang, BMT bisa mengusahakan pencegahan kerugian. Bahkan serta membantu pengelolaan. Dengan demikian, maka bantuan BMT tidak hanya terbatas pada permodalan tetapi juga bimbingan dan penyuluhan. Dengan adanya hubungan kerja dengan pengusaha ini, BMT makin lama makin ahli. Sehingga terjadi hubungan asah, asih, asuh antar BMT dan pengusaha kecil dan kecil bawah.

4. Kegiatan menabung sebagai indikator keberhasilan.<sup>31</sup>

Pengelola BMT mengarahkan pengusaha kecil untuk menabung. Untuk menampung kegiatan menabung ini, BMT sudah menyediakan berbagai jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Pada gilirannya kegiatan menabung ini bisa dipakai sebagai indikator perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bila semula masyarakat harus meminjam atau berhutang untuk biaya sekolah, sewa rumah, dan lain-lain, maka sekarang sudah menabung. Ini juga menjadi indikator kemampuan masyarakat membuat perencanaan hidupnya.

Yang dimaksud dengan faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang menja-

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 278

di faktor penghambat tersebut meliputi :

1. Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.<sup>32</sup>

Keberadaan BMT belum banyak dikenal masyarakat disebabkan karena pengurus dan pengelola belum maksimal dalam melakukan sosialisasi lembaga. Sosialisasi ke masyarakat tidak sekedar memperkenalkan mekanisme produk-produk BMT dan instrumen-instrumen keuangan BMT kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sudah sejak lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Maka upaya untuk pengenalan sistem perbankan syariah berikut prosedur-prosedurnya membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan serta melalui tahap-tahapan yang akan memakan waktu yang cukup lama.

2. Kemacetan kredit<sup>33</sup>

Disebabkan karena kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, tidak efektifnya kontrol atas biaya pengeluaran, kebijaksanaan piutang yang tidak baik dan permodalan yang tidak cukup. Untuk itu diperlukan kejelian dan selektif dalam memberikan kredit kepada nasabah agar tidak terjadi kemacetan. Ketepatan dalam waktu dalam pengembalian

---

<sup>32</sup> Makhalul Ilmi, op. Cit., hal. 50

<sup>33</sup> M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal.

angsuran juga harus diperhatikan agar perputaran uang untuk permodalan bisa berjalan lancar.

### 3. Kualitas SDM yang kurang memadai<sup>34</sup>

Maraknya berdirinya BMT di Indonesia tidak diimbangi dengan SDM yang memiliki latar belakang dan disiplin keilmuan bidang perbankan Syari'ah. Sebagian besar SDM di perbankan Syari'ah terutama bank konvensional yang membuka *Islamic Windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan BMT menjadi lambat. Untuk meningkatkan profesionalitas terhalang oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BMT sehingga proses BMT dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi menjadi rendah.

### 4. Lemahnya permodalan<sup>35</sup>

Kekurangan dana baik untuk keperluan modal kerja untuk tambahan investasi ini disebabkan karena banyaknya permintaan pembiayaan untuk modal usaha kecil sedangkan modal yang dimiliki BMT tidak mencukupi untuk memberikan semua permintaan pembiayaan itu.

---

<sup>34</sup> Baihaqi Abd Madjid dan Syaifudin A. Rasyid, op. Cit., hal. 226

<sup>35</sup> Ibid., hal. 226

## G. Metode Penelitian

### 1. Penentuan obyek dan subyek penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian dalam studi ini adalah kegiatan-kegiatan BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedangkan yang menjadi subyeknya adalah :

#### a. Pengurus dan Pengelola BMT Al-falah yaitu :

- Bapak Ma'mun Murod S.Ag sebagai manajer umum BMT Al-falah
- Bapak Muhammad Amiruddin S.Ag sebagai manajer pembiayaan BMT Al-falah
- Erma Yuli Setyawati SE sebagai administrasi pembukuan BMT Al-falah
- Fatkhul Jannah sebagai kasir/teller BMT Al-falah

#### b. Nasabah BMT Al-falah

- Ibu Hartatik seorang pedagang kelontong
- Bapak Agus seorang pengusaha konveksi
- Bapak Wahyudi seorang pedagang kelontong
- Bapak Asmawan seorang pengusaha pengecoran logam
- Bapak Ahmadi seorang guru
- Ibu Niati seorang pedagang makanan kecil

### 2. Metode Pengumpul Data

#### a. Metode interview

Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terpimpin artinya pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah

tertulis. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang sejarah dan latar belakang, kepengurusan, tujuan, bentuk kegiatan, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat usaha BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di Ceper Kabupaten Klaten.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>36</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari interview maupun observasi yang berhubungan dengan penelitian,

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>37</sup> Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan teknik non partisipan artinya penulisan tidak terlibat langsung secara mendalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT Al-falah. Metode observasi digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana dan kegiatan-kegiatan tertentu yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh BMT Al-falah.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998), hal. 236

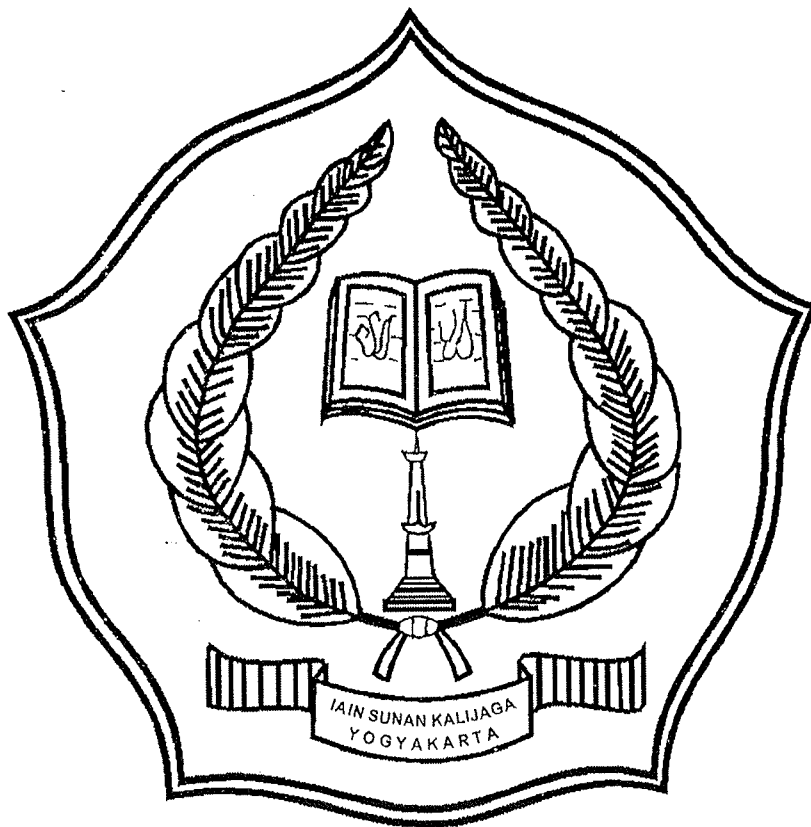
<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 192

penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>38</sup> Maka apabila data telah terkumpul kemudian dideskripsikan atau dijelaskan seperlunya dan akhirnya disimpulkan secara logis.

Analisa data secara induktif yaitu lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya yaitu tentang kegiatan-kegiatan dari BMT Al-falah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

---

<sup>38</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 3



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BMT Al-falah merupakan lembaga keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan.
2. Usaha yang dilakukan BMT Al-falah sudah mencapai sasaran meskipun terbatas, hanya saja yang mendominasi baitul tamwilnya. Sedangkan baitul maalnya tidak berjalan lancar.
3. Faktor pendukung BMT Al-falah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya terdiri dari :
  - a. Peranserta dari tokoh agama dalam mensosialisasikan BMT kepada masyarakat
  - b. Peranserta dari masyarakat untuk menjadikan BMT Al-falah sebagai mitra usahanya
  - c. Letak BMT Al-falah yang strategis sehingga mudah dijangkau
  - d. Kelancaran dalam mengembalikan angsuran
4. Faktor penghambat BMT Al-falah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya terdiri dari :
  - a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan Syari'ah



- b. Kredit macet
- c. Kualitas SDM yang terbatas
- d. Keterbatasan modal

## **B. Saran-saran**

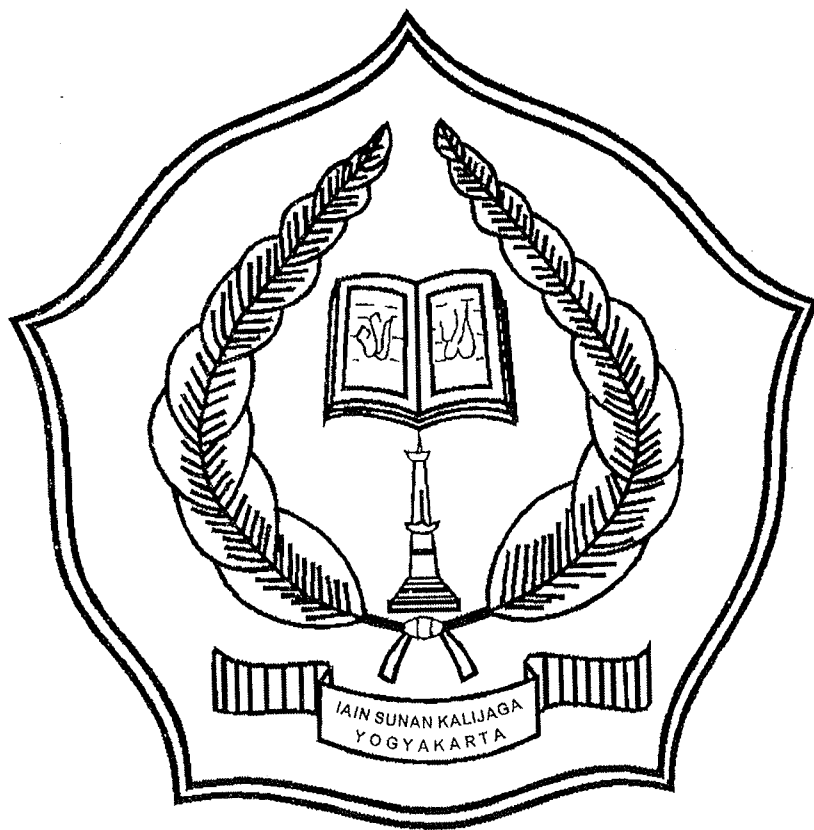
1. Supaya BMT Al-falah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Ceper dan sekitarnya dengan melakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan tingkat kecerdasan kelompok sasaran.
2. Perlu direalisasikan kembali misi baitul maalnya bagi para pengusaha-pengusaha muslim di wilayah Ceper dan sekitarnya yang selama ini belum terlalu banyak disentuh serta dilibatkan dalam hal berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
3. Agar baitul tamwilnya tidak mengalami defisit maka harus selektif dalam memberikan pembiayaan.
4. Melakukan inovasi dengan mencari pangsa pasar baru untuk pengembangan dalam investasi.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998
- Azra, Azyumardi, *Berderma Untuk Semua*, Jakarta : Teraju : 2003
- Buku Pintar BMT Al-falah, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya :Mahkota, 1989
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Formulir pengajuan pembiayaan BMT Al-falah
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2002
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : CIDES, 1996
- Machendrawaty, Nanih dan Safei, Ahmad, Agus, *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2001
- Madjid, Abd, Baihaqi dan Rasyid, A, Syaifuddin (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan gagasan dan gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta : PINBUK, 2000
- Moleong, Lexy,J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- , *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- PINBUK, Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Profil BMT Al-falah

- Qardhawi, Yusuf. *Anatomi Masyarakat Islam*, penerjemah : Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993
- Sumarnonugroho. T. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : PT. Hanindita, 1984
- Sumodiningrat. Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Tohar, M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1999
- Widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jakarta : Mizan, 1999
- Yatim, Usman. dan Hendargo. A. Enny. *Zakat dan Pajak*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1992
- Yulius. dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : PT.Usaha Mulia, 1984